

## BAB V

### KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Produktivitas Satpol PP Kabupaten Purbalingga dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima dilihat dari *output* yang dihasilkan oleh Satpol PP Kabupaten Purbalingga yang mana telah melakukan menjalankan penertiban dan patroli rutin. Penertiban sudah dilakukan sesuai dengan perda yang berlaku, dan patroli rutin telah dijalankan sesuai rencana. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pemberdayaan ialah pengembangan usaha terhadap pedagang kaki lima. Dengan pemberian fasilitas, penguatan kapasitas kelembagaan paguyuban pedagang kaki lima. Namun produktivitas belum sepenuhnya efektif dan efisien dikarenakan beberapa kendala yaitu selama masa pandemi Covid 19 dana dialihkan untuk penanganan Covid 19, kurangnya sumber daya manusia, dan sikap pedagang kaki lima sendiri yaitu kesadaran para pedagang kaki lima yang kurang menaati aturan dalam berjualan yakni mereka masih menempati lokasi yang dilarang untuk aktivitas berjualan khususnya di Kecamatan Purbalingga.
2. Kualitas layanan yang diberikan petugas Satpol PP dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga dalam melakukan penertiban maupun pemberdayaan pedagang kaki lima memberikan pelayanan dengan tetap mengedepankan rasa kemanusiaan tetap memperhatikan hak asasi manusia. Selain

itu juga bentuk kepedulian petugas adalah dengan memberikan pelayanan yang prima dan memberikan apa yang dibutuhkan. Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya Purbalingga Food Center yang dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga untuk melakukan aktivitas berjualan para pedagang kaki lima yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti shelter, gerobak, meja, kursi, listrik, dan air.

3. Responsivitas yang dimiliki Satpol PP maupun Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga dibuktikan dengan adanya Website Matur Bupati Purbalingga yang dapat menerima keluhan dan aspirasi masyarakat. Kemudian masyarakat juga tidak dibatasi untuk menyampaikan keluhannya dengan cara mendatangi langsung ke kantor Satpol PP ataupun Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Selain itu terdapat juga nomor yang dapat dihubungi masyarakat untuk menyalurkan keluhan yang kemudian di proses untuk di carikan solusinya.
4. Responsibilitas Satpol PP mempunyai kewenangan untuk menertibkan pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran karena Satpol PP bertugas menegakan peraturan daerah maupun peraturan bupati. Kedua peraturan tersebut adalah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2019 Tentang Penataan dan Penunjukan Lokasi Sebagai Tempat Berjualan Bagi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Purbalingga. Dalam pelaksanaannya juga sudah sesuai dengan tupoksi masing-masing dinas yang terkait. Dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga yang terdapat dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga. Sedangkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga yang terdapat dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga.

5. Akuntabilitas dibuktikan dengan dalam memberikan pertanggungjawaban yaitu dengan memberikan laporan baik secara lisan maupun tertulis kepada bupati atau pihak yang berhak menerima informasi tersebut. Laporan secara lisan dapat disampaikan melalui telepon dan laporan tertulis dengan membuat laporan akhir yang sah secara rinci setiap kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP maupun Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang nantinya akan dilaporkan kepada Bupati selama satu tahun. Transparansi kepada masyarakat juga di salurkan melalui media sosial seperti instagram dan website. Namun, informasi yang dimuat dalam website dinilai kurang. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan website yang dilakukan belum berjalan dengan baik padahal jika dikelola dengan baik, hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Sedangkan melalui media cetak salah satunya pada koran, dan televisi lokal.

## B. Implikasi

Merujuk pada kesimpulan penelitian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga, maka untuk menindaklanjuti hasil penelitian, dapat di rumuskan implikasi sebagai berikut :

1. Pada aspek produktivitas perlu meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara Satpol PP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan pedagang kaki lima dalam rangka mengoptimalkan pembinaan, pemberian fasilitas untuk memberdayakan pedagang kaki lima serta menambah personil agar dalam melakukan pendataan, pemberian fasilitas, dan memantau perkembangan pedagang kaki lima yang telah di bina dan mengevaluasi apakah perlengkapan/peralatan usaha yang diberikan sudah dimanfaatkan dengan baik.
2. Pada aspek kualitas layanan dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki Satpol PP masih perlu ada penambahan berupa kendaraan untuk mengangkut hasil penertiban pedagang kaki lima dan ruangan untuk penyimpanan barang yang di amankan. Kemudian juga perlu meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di Purbalingga Food Center.
3. Pada aspek responsivitas perlu membuat alamat aduan sendiri untuk mempermudah masyarakat dalam memberikan keluhan dan aspirasinya terkait dengan pedagang kaki lima.
4. Pada aspek responsibilitas perlu lebih mensosialisasikan peraturan terkait penataan dan penunjukan lokasi pedagang kaki lima di wilayah Kecamatan Purbalingga dan peraturan yang ada untuk diberlakukan secara tegas terhadap para pelanggar.

5. Pada aspek akuntabilitas perlu adanya media informasi yang lebih spesifik dan melakukan perbaikan dalam pengelolaan website agar lebih optimal jadi mudah di akses oleh masyarakat umum untuk memperoleh kejelasan dan informasi.

